

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

**Nama : Gom Gom Beauty
NPM : 1905180058
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

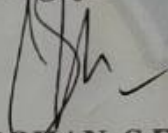
MEMUTUSKAN

Nama : GOM GOM BEAUTY
NPM : 1905180058
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



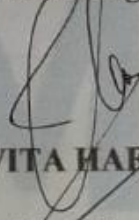
(MUKMIN POHAN, S.E., M.Si.)

Penguji II



(ERI YANTI NASUTION, SE, M.Ec.)

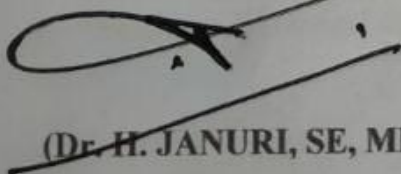
Pembimbing



(Dra. ROSWITA HAENI, M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si, CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : GOM GOM BEAUTY

NPM : 1905180058

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : Jl. EKA RASMI GG. EKA ROSA NO. A6 MEDAN

Judul : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Dekan

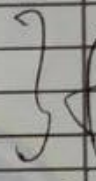

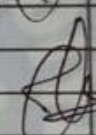
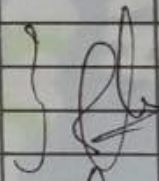
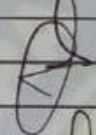
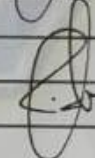
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



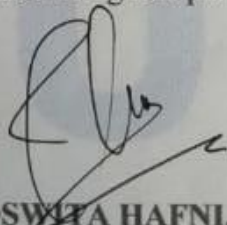
Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Gom Gom Beauty
N.P.M : 1905180058
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat Rumah : Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rosa No. A6 Medan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/7-2023	Acc judul proposal - Ambil data pengeluaran kesehatan di bidang UTB kesehatan dan IPM di Sumatera Utara Kab/ Kota 2019 - 2022		
28/7-2023	Perbaiki Model - - olah data - Carikan UMS Kab/kota Provinsi		
12/8-2023	Perbaiki Analisis Data (tabelan), - Cara - Carikan UMS + data		
1/9-2023	lengkapin Cara - Daftar masalah - Daftar hadir		
7/9-2023	Perbaiki Lembar akhir		
8/9-2023	Acc sidang skripsi		

Pembimbing Skripsi



Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Medan, Agustus 2023
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gom Gom Beauty

NPM : 1905180058

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pemabangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara.” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Gom Gom Beauty

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

Gom Gom Beauty

Program Studi Ekonomi Pembangunan

E-Mail Gomgombeauty@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Komitmen keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan dan bidang kesehatan kemudian dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2009 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengalokasian dana pendidikan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49. Sementara untuk bidang kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara perkembangan dan pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (IPM) sebagai variabel terikat. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (GS). Data yang digunakan adalah data panel menggunakan software *E-views* 12 untuk menganalisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (GS) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : IPM, Pengeluaran Pemerintah, Kesehatan, Pendidikan

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GOVERNMENT
EXPENDITURE IN THE EDUCATION AND HEALTH SECTOR ON
THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN NORTH SUMATRA**

Gom Gom Beauty

Development Economics Study Program

E-Mail Gomgombeauty@gmail.com

This research aims to analyze the influence of government spending in the education and health sectors on the human development index in North Sumatra Province. The government's serious commitment to human development, especially in the education and health sectors, is then expressed in the form of a statutory regulation. Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution, which was amended in 2009, mandates that the state prioritize an education budget of at least twenty percent of the APBN and APBD to meet the needs of providing national education. The allocation of education funds is then further explained in Law number 20 of 2003 concerning the National Education System article 49. Meanwhile for the health sector, Law no. 36 of 2009 concerning Health article 171 regulates the allocation of spending in the health sector as something that is absolutely fulfilled (mandatory spending). The aim of this research is to analyze the development and influence of Government Expenditures in the Education and Health Sector on the Human Development Index in North Sumateta Province from 2019 to 2022. The Human Development Index in North Sumateta Province (HDI) is the dependent variable. Government Expenditures in the Education Sector (GP) and Government Expenditures in the Health Sector (GS). The data used is panel data using E-views 12 software to analyze multiple linear regression data. The results of this research indicate that Government Expenditures in the Education Sector (GP) and Government Expenditures in the Health Sector (GS) have no influence on the Human Development Index in North Sumatera Province.

Keywords: HDI, Government Expenditures, Health, Education

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Kepada Abang saya yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
9. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dengan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta menambah referensi bagi yang membutuhkan.

Medan, Agustus 2023
Penulis

Gom – gom Beauty

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	17
2.1.3 Dimensi Pembangunan Manusia	21
2.1.4 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	24
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Regulasi	26
2.4 Kerangka Berfikir Konseptual.....	28
2.4.1 Kerangka Analisis Penelitian.....	28
2.4.2 Kerangka Konseptual Model Estimasi	28
2.5 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Definisi Operasional	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis Data Penelitian.....	31
3.4 Populasi	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Tujuan Penelitian	33

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif	33
3.6.2 Analisis Model Ekonometrika	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara	45
4.2.2 Hasil Analisis Regresi.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 KESIMPULAN	80
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Sumatera Utara Tahun 2010-2022.....	8
Gambar 2. 1	Efek Konsentrasi	15
Gambar 2. 2	Slope Positif.....	16
Gambar 2. 3	Bagan Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Gambar 2. 4	Persentase Total Pengeluaran Rumah Tangga	22
Gambar 2. 5	Kerangka Analisis Penelitian.....	28
Gambar 2. 6	Kerangka Konseptual Model Estimasi	28
Gambar 3. 1	Definisi Operasional.....	30
Gambar 3. 2	Distribusi Kurva Normal	43
Gambar 3. 3	Distribusi Kurva F	46
Gambar 4. 1	Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara	46
Gambar 4. 2	Peta Sumatera Utara	47
Gambar 4. 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Hasil Proyeksi, 2020-2035	51
Gambar 4. 4	Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022	56
Gambar 4. 5	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022	57
Gambar 4. 6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022.	58
Gambar 4. 7	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022.....	59
Gambar 4. 8	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (milyar rupiah), 2018-2022	66
Gambar 4. 9	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (milyar rupiah), 2018-2022 Actual Government Receipt and Expenditure of Sumatera Utara Province (billion rupiahs), 2018-2022.....	62
Gambar 4. 10	Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Tahun 2019 sampai 2022.....	66
Gambar 4. 11	Hasil Olah Uji Normalitas	68
Gambar 4. 12	Hasil Uji Multikolinearitas	68
Gambar 4. 13	UJI HETEROKEDASTISITAS.....	69
Gambar 4. 14	Hasil Regresi Linear Berganda.....	70
Gambar 4. 15	Uji Chow Data Panel.....	71
Gambar 4. 16	Uji Hausman Data Panel	72
Gambar 4. 17	Uji Hausman Data Panel	73
Gambar 4. 18	Kurva Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	75
Gambar 4. 19	Kurva Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	76
Gambar 4. 20	Kurva Distribusi Uji F Pada Model Regresi.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Anggaran Pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)	3
Tabel 1. 2	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1. 3	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi	7
Tabel 2. 1	Dimensi Pembangunan Manusia	21
Tabel 4. 1	Kemiskinan dan Pembangunan Manusia.....	53
Tabel 4. 2	Peningkatan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Terjadi pada Tahun 2020	55
Tabel 4. 3	Proyeksi dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2020-2035.....	60
Tabel 4. 4	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sampai 2022 (dalam Milyar).....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri, yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan modal dasar pembangunan tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Manusia merupakan sumber kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan modal dasar pembangunan. Yaitu pembangunan yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang produktif dalam menjalankan kehidupannya.

Manusia sebagai sumber daya terpenting dalam suatu pencapaian pembangunan, yaitu pembangunan yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang produktif dalam menjalankan kehidupannya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur Panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana, tetapi sering kali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang, (UNDP: *Humant Development Report*, 2000: 16). Pembangunan manusia atau dalam bahasa latinnya *human development* disebut sebagai proses pilihan bagi penduduk untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan dan pendidikan, serta pilihan untuk memiliki

kehidupan yang layak. Manusia memiliki kehidupan sehat dan umur Panjang diukur dari angka harapan hidup sejak lahir. Manusia memiliki kecakapan pengetahuannya yang dibutuhkan dalam hidupnya dilihat dari rata-rata lama sekolah. Manusia memiliki kehidupan layak dan memiliki perekonomian yang mapan dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah serta pengeluaran perkapita dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan manusia sangat penting atas dasar hal-hal tersebut, dimana dalam pembangunan manusia tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan peningkatan kebutuhan dasar manusia dengan aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian wilayah serta pengeluaran untuk kehidupan, hal tersebut adalah kewajiban pemerintah dalam menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat.

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pembentukan kebutuhan dasar. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan penduduk merupakan salah satu unsur penting yang menjadi subyek maupun obyek dari pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan dan struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan aktivitas dari penduduk yang mendiami daerah tertentu.

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas seperti investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dimana Indeks Pembangunan

Manusia mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Menurut Ritonga (2014), untuk mencapai tujuan negara, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya. Komitmen pemerintah dalam membangun kualitas atau kesejahteraan masyarakat dapat terlihat melalui alokasi pengeluaran pemerintah dari tiga jenis belanja yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Berdasarkan indikator-indikator yang menjadi landasan pengukuran IPM, maka bidang pendidikan dan bidang kesehatan memiliki peran penting untuk menciptakan sumber daya dan pembangunan manusia. Dengan demikian sekurangnya ada dua bidang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui peran alokasi belanja pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki

konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai berlaku sejak diterbitkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 1 Anggaran Pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)

Fungsi APBN	Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Pelayanan umum	517342.00	474999.70	526181.30	627121.30
Pertahanan	108429.00	131246.40	137185.60	134645.40
Ketertiban dan keamanan	142972.00	162729.00	166632.20	176676.40
Ekonomi	389600.00	406175.40	511338.10	399963.60
Lingkungan hidup	17764.00	18360.60	16689.90	14109.20
Perumahan dan fasilitas umum	26516.00	30359.50	33217.30	17291.70
Kesehatan	62758.00	61148.30	111666.70	139502.10
Pariwisata dan budaya	5325.00	5056.70	5261.40	3725.70
Agama	10143.00	10090.80	11075.80	10598.60

Pendidikan	152690.00	156894.40	175236.50	169230.40
Perlindungan sosial	200801.00	226416.50	260063.60	251678.00
Jumlah	1634340.00	1683477.20	1954548.50	1944542.30

Sumber : bps.go.id

Dari data anggaran pengeluaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi (milyar rupiah) tahun 2019 sampai tahun 2022, terlihat bahwa anggaran untuk sector sector Kesehatan dan pendidikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dan 2022, ini terjadi karena pandemic covid-19 yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini, pemulihan ekonomi di tahun 2022 membutuhkan banyak sekali anggaran pemerintah demi pulihnya ekonomi. namun berbeda dengan sektor ekonomi, anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan dari tahun 2021 menuju tahun 2022 setelah terjadi peningkatan pada setahun sebelumnya.

Tabel 1. 2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) Provinsi Sumatera Utara

Fungsi APBN	Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) Provinsi Sumatera Utara			
	2019	2020	2021	2022
Kesehatan	1.255.160	1.222.966	2.233.334	2.790.042
Pendidikan	763.450	784.472	876.182,5	846.152

Sumber : Bps data diolah

Dari data Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam pengeluaran bidang Kesehatan di tahun 2020 menuju tahun 2021, ini dikarenakan pandemic covid-19 yang terjadi yang menekan pengeluaran pemerintah dalam belanja alat Kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain. Namun untuk sektor Pendidikan terjadi penutunan angkaan belanja pemerintah pada tahun 2022 setelah terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021.

Komitmen keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan dan bidang kesehatan kemudian dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2009 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pengalokasian dana pendidikan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49. Sementara untuk bidang kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar sekurang-kurangnya lima persen dari APBN, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sepuluh persen dari APBD.

Alokasi dana bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut seharusnya tidak termasuk alokasi pembayaran gaji aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dalam banyak penelitian sebelumnya, dana pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM di berbagai lokasi dan waktu penelitian.

Walaupun demikian, terdapat juga penelitian dengan hasil temuan dimana anggaran pendidikan ternyata berpengaruh negatif terhadap pembentukan IPM. Winarti (2014) menenggarai bahwa pengaruh negatif anggaran

pendidikan terhadap IPM disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. Dengan adanya belanja pendidikan yang tidak efektif, tekanan pada APBN maupun APBD semakin berat.

Anggaran belanja publik baik anggaran negara maupun anggaran daerah sudah banyak memiliki belanja yang memiliki karakteristik belanja mengikat. Belanja mengikat ini adalah belanja yang bersifat *mandatory spending*, yang wajib dialokasikan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, pembayaran utang dan bunga serta dana transfer ke daerah.

Hajibabaei dan Ahmadi (2104) menyatakan bahwa pada saat bagian belanja pemerintah dari PDB masih berjumlah lebih kecil dari aturan yang berlaku, maka IPM akan terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja pemerintah. namun apabila bagian belanja pemerintah dari PDB sudah lebih besar daripada aturan, maka IPM akan mengalami penurunan. Scully (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada kondisi dimana belanja pemerintah sudah melampaui batas maksimal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan (kesejahteraan masyarakat) maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah belanja pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pengurangan jumlah alokasi anggaran belanja tidak akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnya memperhatikan tingkat efektifitas belanja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, bukan pada pada seberapa besar jumlah uang yang dibelanjakan.

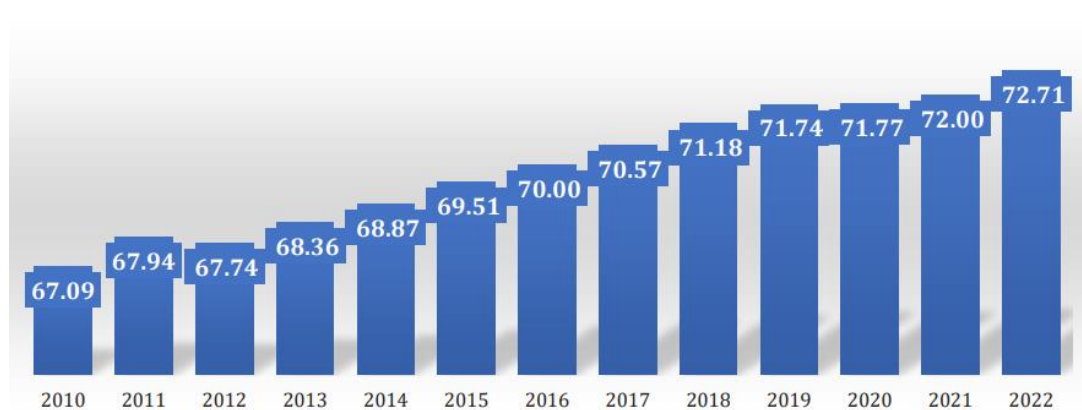
Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya. Melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 memperkenalkan” *Human Development Index (HDI)*” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil dari pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Jadi setiap provinsi di Indonesia yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah semakin membaik.

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi			
	2019	2020	2021	2022
ACEH	71.74	71.99	72.18	72.80
SUMATERA UTARA	61.65	71.77	72.00	72.71
SUMATERA BARAT	66.52	72.38	72.65	73.26
RIAU	69.75	72.71	72.94	73.52
JAMBI	68.86	71.29	71.63	72.14
SUMATERA SELATAN	73.33	70.01	70.24	70.90

BENGKULU	74.92	71.40	71.64	72.16
LAMPUNG	71.94	69.69	69.90	70.45
KEP. BANGKA BELITUNG	69.92	71.47	71.69	72.24
KEP. RIAU	72.98	75.59	75.79	76.46
DKI JAKARTA	71.42	80.77	81.11	81.65
JAWA BARAT	74.25	72.09	72.45	73.12
JAWA TENGAH	75.43	71.87	72.16	72.79
DI YOGYAKARTA	70.76	79.97	80.22	80.64
JAWA TIMUR	61.59	71.71	72.14	72.75
BANTEN	68.83	72.45	72.72	73.32
BALI	67.47	75.50	75.69	76.44
NUSA TENGGARA BARAT	70.55	68.25	68.65	69.46
NUSA TENGGARA TIMUR	70.21	65.19	65.28	65.90
KALIMANTAN BARAT	68.35	67.66	67.90	68.63
KALIMANTAN TENGAH	69.29	71.05	71.25	71.63
KALIMANTAN SELATAN	68.16	70.91	71.28	71.84
KALIMANTAN TIMUR	71.39	76.24	76.88	77.44
KALIMANTAN UTARA	71.43	70.63	71.19	71.83
SULAWESI UTARA	61.98	72.93	73.30	73.81
SULAWESI TENGAH	61.14	69.55	69.79	70.28
SULAWESI SELATAN	73.41	71.93	72.24	72.82
SULAWESI TENGGARA	68.51	71.45	71.66	72.23
GORONTALO	78.57	68.68	69.00	69.81
SULAWESI BARAT	75.08	66.11	66.36	66.92
MALUKU	80.97	69.49	69.71	70.22
MALUKU UTARA	75.89	68.49	68.76	69.47
PAPUA BARAT	75.06	65.09	65.26	65.89
PAPUA	69.30	60.44	60.62	61.39
INDONESIA		71.94	72.29	72.91

Jika dilihat dari gambar perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2022 Menurut Provinsi di Indonesia, terlihat bahwa pertumbuhan semakin baik dari tahun ke tahun karena mendekati angka 100.



Gambar 1. 1 Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Sumatera Utara Tahun 2010-2022

Sumber : bps.go.id

Sumatera Utara merupakan daerah yang potensu sumber daya manusia yang cukup padat, dengan kondisi indeks Pembangunan manusia yang cenderung meningkat pada beberapa tahun terakhir, ini dapat dilihat dari grafik indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara, Dari gambar diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai 2022, Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada 2010 menjadi 72,71 pada 2022. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak 2016.

Melihat perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara yang terus menunjukkan perbaikan dan peningkatan, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia atau modal manusia agar kualitas sumber daya manusia dapat terus bertumbuh. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulham, dkk, 2017) menyatakan bahwa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor atau bidang pendidikan dan kesehatan.

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Untuk mendukung kedua aspek tersebut dibutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor Pendidikan dan kesehatan. Sehingga membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan apakah anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan di Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022.

Terlepas dari aspek Pendidikan dan Kesehatan, ada salah satu faktor yang menjadi indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembnagunan manusia,

Pengeluaran per Kapita disesuaikan namun peneliti tidak menggunakan indicator ini dalam variable penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada 2010 menjadi 72,71 pada 2022. namun untuk anggaran belanja pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terjadi penurunan atau pengurangan dalam pengalokasian belanja dari pemerintah.
2. Terjadi penurunan dalam anggaran belanja pemerintah untuk sektor Kesehatan pada tahun 2020, baik itu pusat maupun di Provinsi Sumatera Utara, padahal tahun 2020 adalah awal mula terjadinya pandemic Covid-19 yang memfokuskan pemerintah untuk memenuhi alat Kesehatan dan obat-obatan untuk menangani virus corona.
3. Terjadi peningkatan dalam anggaran belanja pemerintah untuk sektor Pendidikan yang cukup besar pada tahun 2021, sedangkan Sebagian besar kegiatan dilakukan secara hybrid.

1.3 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Peneliti membatasi pada masalah apakah pengaruh pengeluaran pemerintah dalam sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan dalam anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sector Pendidikan, dan Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Bagi Akademik

1. Sebagai bahan gambaran kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang apakah Pengeluaran pemerintah dalam sector Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa Ekonomi khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
3. Untuk Menambah dan melengkapi sekaligus sebagai pembandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.

b. Bagi Non Akademik

1. Mensosialisasikan tentang Pengeluaran pemerintah dalam sector Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022

2. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
4. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan Pengeluaran pemerintah dalam sector Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999):

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer paymen

Tujuan dari teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan factor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Pengeluaran pemerintah untuk transfer paymen Tujuan dari teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan factor-faktor

yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Sistem penganggaran dan belanja negara secara inflisit menggunakan system unified budget, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dengan klasifikasi sebelumnya. Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi (Nota Keuangan dan RAPBN, 2005). Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru, maka belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (1) dana perimbangan, dan (2) dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan belanja rutin dan belanja pembangunan (unified budget) (suminto:2004)

Menurut Suparmoko (1996), pengeluaran–pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil–hasil perusahaan dari industri yang pada

gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar (Mangkoesebroto, 1994).

Dalam Basri (2005), Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semenamena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

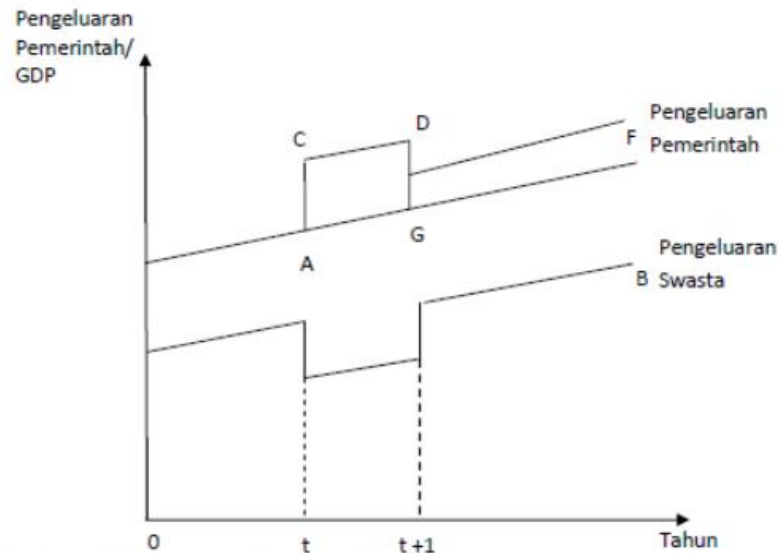
Jadi dalam keadaan normal, kenaikan Product Domestic Bruto (PDB) menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan

normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah (Basri, 2005)

Dalam Mangkoesobroto (1994), Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena Gross National Product (GNP) bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah

berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: (Mangkoesoebroto, 1994)

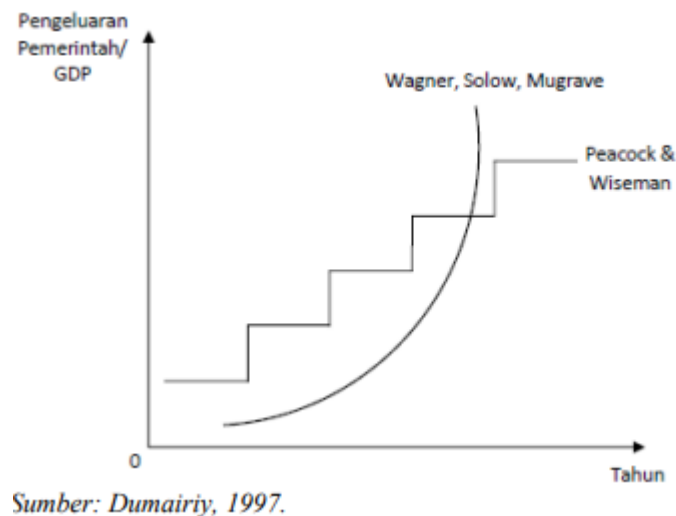


Sumber: Mangkoesoebroto, 1994.

Gambar 2. 1 Efek Konsentrasi

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat

Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 2 Slope Positif

Dalam Mangkoesobroto (1994), Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Adapun hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pasal 10 dan pasal 11 bagian keempat menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Todaro dan Smith (2006) kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna dari pembangunan. Terlebih lagi bagi kelompok masyarakat miskin yang umumnya tidak punya sumber daya kecuali modal tenaga maka kesehatan menjadi kebutuhan yang paling esensial. Tenaga kerja miskin yang tidak sehat tidak akan mampu bekerja maksimal sehingga produktivitasnya akan rendah, dan pendapatannya juga rendah. Demikian pula kondisi kesehatan yang buruk terutama pada ibu dan anak akan menciptakan kualitas sumber daya

manusia yang rendah. Anak-anak yang kurang sehat akan mengalami gangguan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan pun akan mengalami penurunan. Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat di alokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek. Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif. Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan, Todaro (2011;57). Menurut BPS, pemikiran tentang pembangunan telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi

(*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu:

- 1) Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia;
- 2) Mengemban misi pemberantasan kemiskinan;
- 3) Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa;
- 4) Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem;
- 5) Memperkuat basis civil society dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan
- 6) Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Basu dalam Pambudi, 2008).

Menurut UNDP dalam BPS 2008, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk, karena penduduk adalah kekayaan

nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian dan pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (*capability*) manusia tetapi juga pada upayaupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak

namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru.

Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- 1) Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- 2) Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- 3) PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Pembangunan manusia berperan penting dalam alur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan manusia untuk proses selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan manusia harus ditingkatkan terlebih dahulu sebelum pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut dibantah oleh Ranis dan Steward. Ranis dan Steward (2005) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

2.1.3 Dimensi Pembangunan Manusia

Tabel 2. 1 Dimensi Pembangunan Manusia

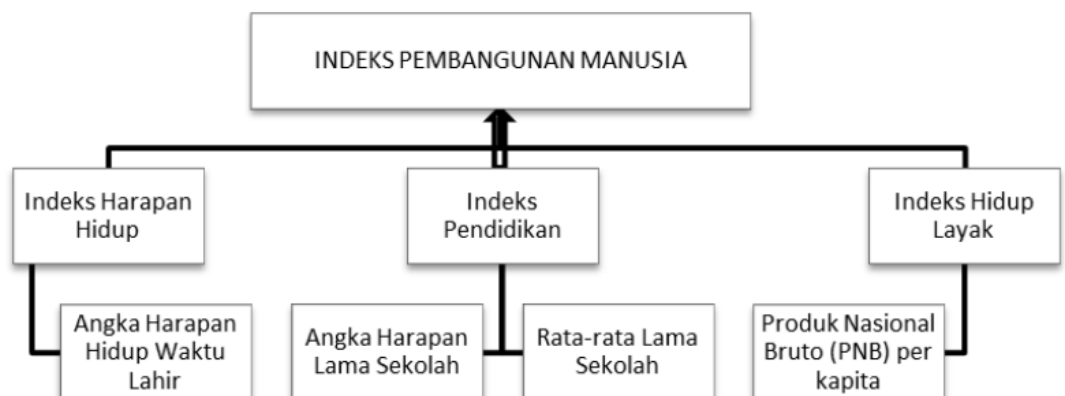
Komponen Pembentuk IPM

Dimensi	Indikator UNDP	Indikator BPS	Indeks Dimensi	IPM
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pd saat lahir (e_0)	Angka harapan hidup pd saat lahir (e_0)	Indeks harapan hidup → Indeks X1	
Pengetahuan	1. Angka melek huruf (AMH) 2. GER	1. Angka melek huruf (AMH) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)	Indeks pendidikan → Indeks X2	
Kehidupan yang layak	Pendapatan per kapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah): PDB riil	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah): Data Susenas	Indeks pendapatan → Indeks X3	

6

Pada tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).



Gambar 2. 3 Bagan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

A. Indeks Harapan Hidup Angka Harapan Hidup

Merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya (BPS: 2014). Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (daya beli) dengan formula Atkinson.

Pengertian daya beli masyarakat menurut Dr. Supawi pawengan adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun, dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu

sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya. Penghitungan Paritas Daya Beli. Dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan. Kegunaannya adalah menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.



Gambar 2. 4 Persentase Total Pengeluaran Rumah Tangga

B. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan angka harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS: 2014). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS: 2014). Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang

bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

C. Indeks Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi (BPS: 2014). UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran rata-rata disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Perhitungan paritas daya beli dihitung dari bundle komoditas makanan dan non makanan.

Rumus Perhitungan Paritas Daya Beli (PPP):

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan :

P_{ij} = Harga komoditas i di kab/kota

P_{ik} = Harga komoditas

m = Jumlah komoditas

Pengelompokan indeks pembangunan manusia (BPS, 2014):

$IPM < 60$: IPM rendah

$60 \leq IPM < 70$: IPM sedang

$70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi

2.1.4 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia terdapat tiga komponen yang

digunakan sebagai komponen dasar perhitungannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dihitung dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dengan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan :

HLS : Harapan Lama

Sekolah

RLS : Rata-rata Lama

Sekolah

b. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dihitung dengan memasukkan angka harapan hidup saat lahir, dengan rumus:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} + \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$$

Keterangan :

I : Indeks

AHH : Angka Harapan Hidup

c. Dimensi Pengeluaran

Dimensi pengeluaran dihitung dengan memasukkan pengeluaran per kapita disesuaikan, dengan rumus:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga komponen pembentuknya dan dinyatakan dalam bentuk poin

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jehuda Jean Sanny Mongan	Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.
2.	Desiana Pinastika Sulisty	ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kemandirian Fiskal Daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. sedangkan variabel Belanja Daerah Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai R-Squared sebesar 0.808190 yang berarti bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat di jelaskan sebesar 80,81% di dalam model dan sisanya 19,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
3.	Naganegara, King Clinton	Analisis Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan variabel Belanja Bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara dan variabel Belanja bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Regulasi

Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 dari 3 alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Yang satu lagi adalah tingkat kesejahteraan (pertumbuhan dan ekonomi). Bagaimana derajat kualitas pembangunan manusia Indonesia: Pendidikan dan Kesehatan menjadi tolok

ukurnya, selain pertumbuhan kesejahteraan ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan, keduanya juga memiliki budget mandatory yang kuat dalam UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Diperkuat Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan persentase 20 persen tersebut di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

- 1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji.
- 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Posisi Pendidikan dan kesehatan, keduanya menjadi layanan dasar dari negara ke warga negara. Tulisan singkat berikut berusaha melihat bagaimana

kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ada 3 dokumen yang akan dijadikan sebagai rujukan utama, yakni Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan APBN Tahun 2015- 2019. Lalu, apa rekomendasi yang diusulkan untuk 5 tahun berikutnya tahun 2020-2025

2.4 Kerangka Berfikir Konseptual

2.4.1 Kerangka Analisis Penelitian

Melakukan analisis sosial ekonomi secara deskriptif tentang bagaimana perkembangan dalam anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera?



Gambar 2. 5 Kerangka Analisis Penelitian

Melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sector Pendidikan dan Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022

2.4.2 Kerangka Konseptual Model Estimasi



Gambar 2. 6 Kerangka Konseptual Model Estimasi

Dari model ini, Variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan kesehatan, merupakan variable bebas yang mempengaruhi secara langsung terIndeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dimana IPM merupakan variable terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian penelitian terdahulu, terdapat pengaruh antara indikator pengeluaran pemerintah dalam sektor Pendidikan (GP) dan indicator pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatah (GS terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data skunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: indikator pengeluaran pemerintah dalam sektor Pendidikan (GP) dan indicator pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan (GS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara.

Gambar 3. 1 Definisi Operasional

Variabel	Deinisi Operasional	Sumber Data	Keterangan Variabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.(IPM) % (persen)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id	Variabel Terikat
Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (GP)	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Satuan Milyar)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id	Variabel Bebas
Pengeluaran Pemerintah pada bidang Kesehatan (GS)	(Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan.(Satuan Milyar)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id	Variabel Bebas

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil serta mengumpulkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera

Utara, serta melalui media internet yang relevan. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023.

3.3 Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk data yang telah siap olah atau publikasi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* (runtut waktu) yaitu data tahunan yang dimulai pada tahun 2019-2022. Kemudian menggunakan data Cross Section yaitu data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, dan akan diolah dengan *Eviews 12*.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

3.4 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website- website resmi Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Mengenai Bagaimana perkembangan dalam Pengeluaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2022.

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana perkembangan dalam anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (2019-2022).

3.6.2 Analisis Model Ekonometrika

a. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)

2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya .

Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapat dengan distribusi data normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov dapat menggunakan program analisis statistik SPSS. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dinyatakan berdistribusi tidak normal.

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n * R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

1. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain

variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_i dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $2 < DW < 4-d_u$ maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003)

b. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai dampak tingkat tenaga kerja dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 4 tahun (dari tahun 2019 – 2022) , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 GK_1 + \beta_2 GPrt + \varepsilon_t$$

Dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = data cross section

t = data time series

GK = pengeluaran pemerintah kesehatan

GP = pengeluaran pemerintah Pendidikan

α = Konstanta

ε_t = *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

A. Metode Pemilihan Model

Penelitian ini menggunakan model regresi linier dengan metode kuadrat terkecil atau OLS (ordinary least squares) berupa model regresi berganda yang disajikan secara lebih lugas dan mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata: disturbance term = 0
- b. Tidak terdapat korelasi serial (serial autocorrelation) diantara disturbance term $COV(\mu_t, \mu_j) = 0: I \neq j$
- c. Sifat momocidentecity dari disturbance term $Var(\mu_I) = \sigma^2$.
Covariance antara μ_I dari setiap variabel bebas (x) = 0
- d. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
- e. Tidak terdapat collinearity antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
- f. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan

bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (best linear unbiased estimator)

B. Ragam Bentuk model Panel Data

- ***Common Effect Model (CEM)***

Model CEM sering kali disebut sebagai bentuk paling sederhana dalam model regresi dengan data panel. Bahkan hasil estimasinya terkesan tidak ada bedanya dengan model regresi yang sering digunakan. Hal tersebut karena tujuan penggunaan model ini adalah mendapat jumlah data yang mencukupi dalam proses estimasi namun tidak perlu menggunakan data time series periode waktu yang panjang.

Bentuk umum model CEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} : variabel terikat pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

X_{it} : variabel bebas pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β : koefisien slop atau koefisien arah

α : intercept model regresi

ε_{it} : komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

- ***Fixed Effect Model (FEM)***

Asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antar individu (ditunjukkan oleh *unobserved factor*) dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah data panel OLS. Model ini juga untuk mengestimasi data panel

dengan menambahkan variabel dummy. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini dapat diakomodasi melalui perbedaan diintersepnya. Oleh karena itu dalam model fixed effect, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \alpha_1 + \sum_{k=2}^N \alpha_k D_{ki} + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}$$

- **Random Effect model (REM)**

Asumsi penting dalam model ini bahwa nilai perbedaan antar individu (ditunjukkan oleh *unobserved factor*) tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan kata lain, model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu.

C. Pemilihan Model Terbaik

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

1. Uji Chow

Menurut beberapa literatur, uji chow dilakukan untuk memilih apakah *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam proses interpretasi hasil. Pengujian menggunakan uji F. tahapan yang dilakukan yaitu:

$H_0 : \alpha_1 + \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ (efek unit *cross section* secara keseluruhan tidak berarti)

H_1 : minimal ada satu $\alpha_i \neq 0$; $i = 1, 2, \dots, n$ (efek wilayah berarti)

Uji statistik yang digunakan yaitu uji F, yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{[RRSS - URSS]/(n-1)}{URSS/(nT-n-k)}$$

Dimana:

n = jumlah individu (*cross section*)

T = jumlah periode waktu (*time series*)

K = jumlah variabel penjelas

$RRSS$ = *restricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap

$URSS$ = *unrestricted residual sums of squares* yang berasal dari model efek tetap

Jika nilai f -hitung $>$ f -tabel maka hal tersebut menunjukkan hasilnya menolak H_0 sehingga model yang dipilih yaitu model *fixed effect*.

3. Uji Hausman

Pengujian husman bertujuan untuk memilih apakah *model fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : tidak ada perbedaan antara *model fixed effect* dengan *model random effect*

H_1 : terdapat perbedaan antarkedua model tersebut

Jika hasil estimasi menunjukkan “menolak H_0 ”, maka yang dipilih adalah model *fixed effect*. Sedangkan jika hasilnya “menerima H_0 ” maka model harus di uji lagi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM test) atau *Breusch-pagan test* (BP test).

E. Metode Analisis Pemilihan Model

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai r -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap p variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau adjusted R^2 (Kuncoro, 2018).

2. Pengujian (Test Diagnostic)

a. Uji Parsial (uji t-statistik)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh GP dan GK terhadap IPM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

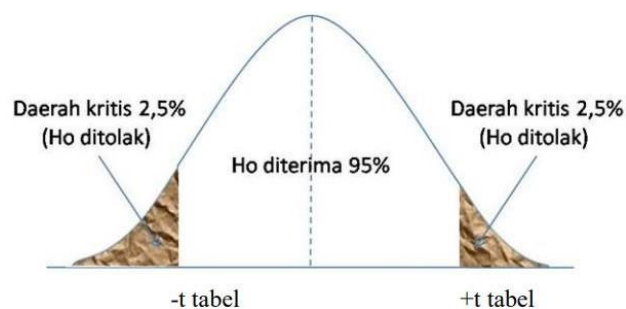
1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara)
 Hipotesis $H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara).

2. Kriteria uji:

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Distribusi Kurva Normal

3. Kesimpulan:

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0 .

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model Indeks Pembangunan Manusia (IPM), anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan (GP) dan kesehatan (GS) di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

a. Hipotesis H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah penduduk, gross domestic product, dan investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka pada setiap provinsi di Pulau Sumatera).

Hipotesis H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel model Indeks Pembangunan Manusia (IPM), anggaran belanja pemerintah dalam sektor Pendidikan (GP), kesehatan (GS), Kemiskinan (KM) dan Tingkat Pengangguran Terbukata (TPT) di Provinsi Sumatera Utara).

2. Uji stastistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

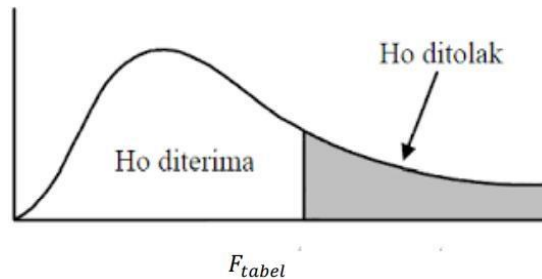
$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana: k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

3. Kriteria Uji: Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Distribusi Kurva F

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $prob < \alpha = 10\%$ atau tolak H_0 . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai Prob. F-Statistic atau p-value pada e-views.

1. Kesimpulan

- a. Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara

Wilayah Provinsi Sumatra Utara meliputi sebanyak 419 pulau. Provinsi Sumatera Utara memiliki dua pulau terluar. Pertama ialah Pulau Simuk yang berada di Kepulauan Nias. Kedua ialah Pulau Berhala di Selat Malaka. Kepulauan Nias terdiri dari 132 pulau yang dibedakan menjadi 1 pulau besar dan 131 pulau kecil. Pulau besarnya ialah pulau Nias. sementara pulau-pulau kecilnya berada di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudra Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuaasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautele di pulau Sibuaasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Dari karakteristik di atas, wilayah pantai timur memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Wilayah pantai timur merupakan wilayah dengan konsentrasi industri dikarenakan mempunyai topografi yang datar dan terletak dengan jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka. Sehingga wilayah pantai timur merupakan pusat pertumbuhan di Sumut. Wilayah pantai barat dan wilayah pegunungan merupakan sentra perkebunan dan tanaman hortikultura dikarenakan kondisi iklim yang sesuai, dan wilayah kepulauan Nias merupakan sentra perikanan Tantangan dalam perkembangan

wilayah tersebut adalah aspek konektivitas, dikarenakan bentang alam Sumut yang luas dan terdapat hambatan alam berupa pegunungan Bukit Barisan bila hendak menghubungkan antara wilayah pantai barat dan dataran tinggi ke wilayah pantai timur melalui jalur darat. Wilayah kepulauan Nias mempunyai kekhasan sendiri dengan konektivitas melalui jalur perairan. Selain itu adanya potensi resiko bencana alam karena secara geografis sebagian wilayah pantai barat dan kepulauan Nias merupakan wilayah rawan bencana sehingga memberikan tantangan tambahan dalam penyediaan infrastruktur di wilayah tersebut.



Sumber : Bappeda Prov. Sumut

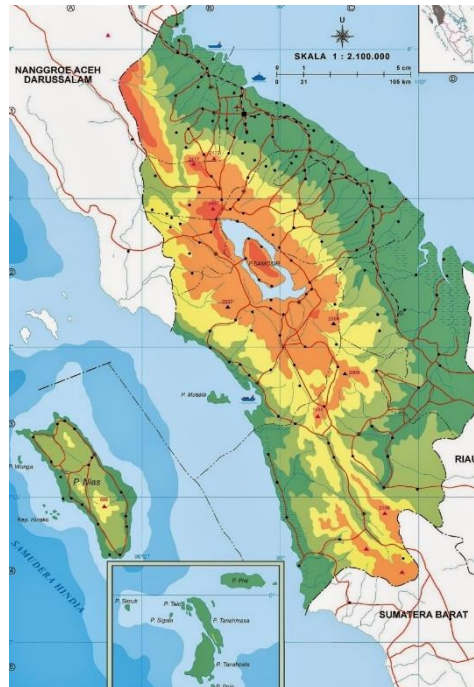
Wilayah	Persentase Jumlah Penduduk	Persentase Luas Wilayah
Pantai Timur	62,38%	34%
Dataran Tinggi	18,47%	28%
Pantai Barat	13,45%	30%
Kepulauan Nias	5,70%	8%

Gambar 4. 1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara *de jure saja*. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan

pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.



Gambar 4. 2 Peta Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- b. Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur,

- a. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli,
- b. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar
- c. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° – 4° Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh.

1. Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis, Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan, Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

2. Kependudukan

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 adalah 205 jiwa per km² kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 205 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 2010-2020 adalah 1,28 persen per tahun, dan pada tahun 2020-2022 menjadi 1,21 persen per tahun. Pada Tahun 2022 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.115.206 jiwa yang terdiri dari 7.584.993 jiwa penduduk laki-laki dan 7.530.213 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100,73 Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan

penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Gambar 4. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Hasil Proyeksi, 2020-2035

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020 - 2025 sebesar 1,36 persen secara bertahap melambat menjadi 1,14 persen pada periode 2025 - 2030 dan menjadi 0,95 persen pada periode 2030 - 2035.

3. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, TPAK di Sumatera Utara sebesar 69,10 persen kemudian naik menjadi 69,53 persen pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar berpendidikan SMA. Persentase golongan ini mencapai 42,50 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masingmasing sekitar 25,21 persen, 19,92 persen, sedangkan 12,37 persen berpendidikan di atas SMA. Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (37,26%) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar

20,05 persen, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga mencapai 15,55 persen, sehingga hanya 3,67persen penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor jasa yaitu 48,36 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 34,65 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 16,99 persen

4. Pendidikan

Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Tabel 4.1.1. hingga Tabel 4.1.9. memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, kelas maupun guru. Pada tingkat pendidikan dasar, jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2022/2023 ada sebanyak 10.865 unit dengan jumlah guru 113.123 orang dan murid sebanyak 1.751.524 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah ada sebanyak 3.867 sekolah dengan jumlah guru 60.827 orang dan jumlah murid ada sebanyak 863.550 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada sebanyak 2.654 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 52.903 orang dan 805.753 siswa termasuk didalamnya.

Rasio murid SD/ sederajat terhadap sekolah di Sumatera Utara secara rata-rata pada tahun 2022/2023 sebesar 161. Rasio tertinggi terdapat di Kota Sibolga yaitu 264 murid per sekolah dan Kota Medan sebanyak 251 murid per

sekolah. Sedangkan rasio terkecil terdapat di Kabupaten Samosir yaitu sebesar 94 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat, rasio murid terhadap sekolah adalah sebesar 248 murid per sekolah. Rasio tertinggi terdapat di Kota Pematangsiantar yaitu 405 murid untuk setiap sekolah dan yang terendah terdapat di Pakpak Bharat yaitu 112 murid untuk setiap sekolah.

Sementara itu rasio murid SMA/ sederajat terhadap sekolah sebesar 361 murid per sekolah. Rasio yang tertinggi terdapat di Kota Tanjungbalai yaitu 573 murid per sekolah dan terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu 183 murid untuk setiap sekolah. Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2022 sebanyak 214, yang terdiri dari 3 perguruan tinggi negeri dan 211 perguruan tinggi swasta

5. Kemiskinan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 4. 1 Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (juta) Number of Poor People (million)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten / Regency			
01 Nias	454.570	23,23	16,00
02 Mandailing Natal	450.345	40,98	8,92
03 Tapanuli Selatan	445.612	23,05	8,07
04 Tapanuli Tengah	450.940	47,07	11,71
05 Tapanuli Utara	466.316	27,47	8,93
06 Toba	465.681	16,48	8,89
07 Labuhanbatu	489.503	43,27	8,26
08 Asahan	397.944	64,49	8,64
09 Simalungun	441.744	72,47	8,26
10 Dairi	436.713	22,53	7,88
11 Karo	563.660	35,93	8,17
12 Deli Serdang	448.489	85,28	3,62
13 Langkat	453.383	100,45	9,49
14 Nias Selatan	350.452	54,16	16,48
15 Humbang Hasundutan	419.180	17,33	8,86
16 Pakpak Bharat	357.844	4,52	8,66
17 Samosir	396.267	14,97	11,77
18 Serdang Bedagai	478.072	48,22	7,82
19 Batu Bara	508.524	49,39	11,53
20 Padang Lawas Utara	430.944	26,09	8,94
21 Padang Lawas	418.610	24,45	8,05
22 Labuhanbatu Selatan	448.994	29,38	8,09
23 Labuhanbatu Utara	527.922	33,91	9,09
24 Nias Utara	474.533	32,87	23,40
25 Nias Barat	487.469	20,42	24,75
Kota / Municipality			
71 Sibolga	516.367	10,05	11,47
72 Tanjungbalai	515.456	22,65	12,45
73 Pematangsiantar	631.886	20,53	7,88
74 Tebing Tinggi	578.512	16,34	9,59
75 Medan	607.166	187,74	8,07
76 Binjai	499.451	14,61	5,10
77 Padang Sidempuan	480.196	16,03	6,89
78 Gunungsitoli	426.349	21,85	14,81
Sumatera Utara	561.004	1.268,19	8,42

Sumber : bps.go.id

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018- 2022 terus mengalami penurunan mulai dari 1,46 juta pada Maret 2018 menjadi 1,26 juta pada September 2022. Garis kemiskinan pada bulan September 2022 mencapai Rp563.783 dengan persentase penduduk miskin 8,33%. Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 8,63% pada September 2022, sementara itu di wilayah perdesaan mencapai 7,96%.

Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota pada Maret 2022 terlihat bahwa kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai merupakan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2022 mencapai 1,41 dengan Indeks Keparahan kemiskinan mencapai 0,34. Kedua indeks ini menunjukkan perbandingan antara penduduk miskin dengan penduduk tidak miskin yang ada di masyarakat. Secara umum angka indeks ini diharapkan semakin mengecil setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019-2022 peningkatan terjadi pada tahun 2020 ketika pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 4. 2 Peningkatan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / Regency						
01 Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	62,74	63,69
02 Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	67,19	68,05
03 Tapanuli Selatan	68,69	69,10	69,75	70,12	70,33	70,92
04 Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61	70,31
05 Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
06 Toba	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96
07 Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09	72,92
08 Asahan	69,10	69,49	69,92	70,29	70,49	71,13
09 Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	73,40	73,77
10 Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	71,84	72,56
11 Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	74,83	75,36
12 Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	75,53	76,19
13 Langkat	69,82	70,27	70,76	71,00	71,35	71,86
14 Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	62,35	63,17
15 Humbang Hasundutan	67,30	67,96	68,83	68,87	69,41	70,32
16 Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94	68,85
17 Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
18 Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	70,56	71,21
19 Batu Bara	67,20	67,67	68,35	68,36	68,58	69,51
20 Padang Lawas Utara	68,34	68,77	69,29	69,85	70,11	70,93
21 Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	68,64	69,58
22 Labuhanbatu Selatan	70,48	70,98	71,39	71,40	71,69	72,16
23 Labuhanbatu Utara	70,79	71,08	71,43	71,61	71,87	72,77
24 Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	62,82	63,75
25 Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	61,99	62,93
Kota / Municipality						
71 Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	73,94	74,74
72 Tanjungbalai	67,41	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86
73 Pematangsiantar	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17	79,70
74 Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08	75,17	75,42	76,17
75 Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76
76 Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	76,01	76,95
77 Padang Sidempuan	73,81	74,38	75,06	75,22	75,48	76,05
78 Gunungsitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	69,61	70,23
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71

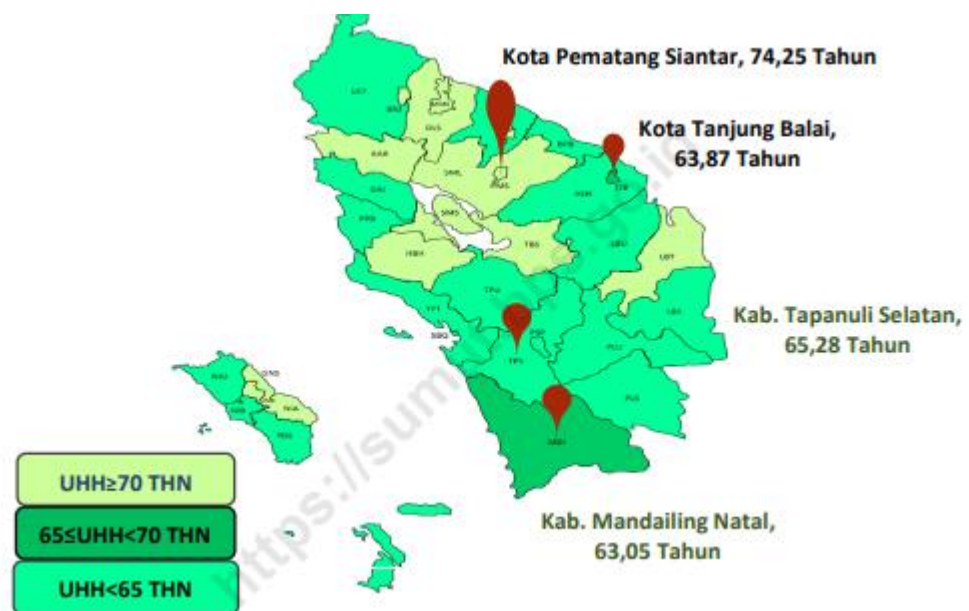
Sumber : Bps.go.id

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai 72,71 mengalami peningkatan 0,71 poin dari 72,00 pada tahun 2021. Komponen yang menyusun IPM yaitu umur harapan hidup mencapai 69,61 tahun, harapan lama sekolah 13,31 tahun, rata-rata lama sekolah 9,71 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan 10,8 juta rupiah pada tahun 2022. Dilihat berdasarkan wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan daerah dengan angka IPM tertinggi yaitu 81,76 sementara itu

kabupaten nias Barat merupakan wilayah dengan nilai IPM terendah yaitu sebesar 62,93.

6. Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Kondisi dimensi kesehatan pada level kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.



Gambar 4. 4 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022

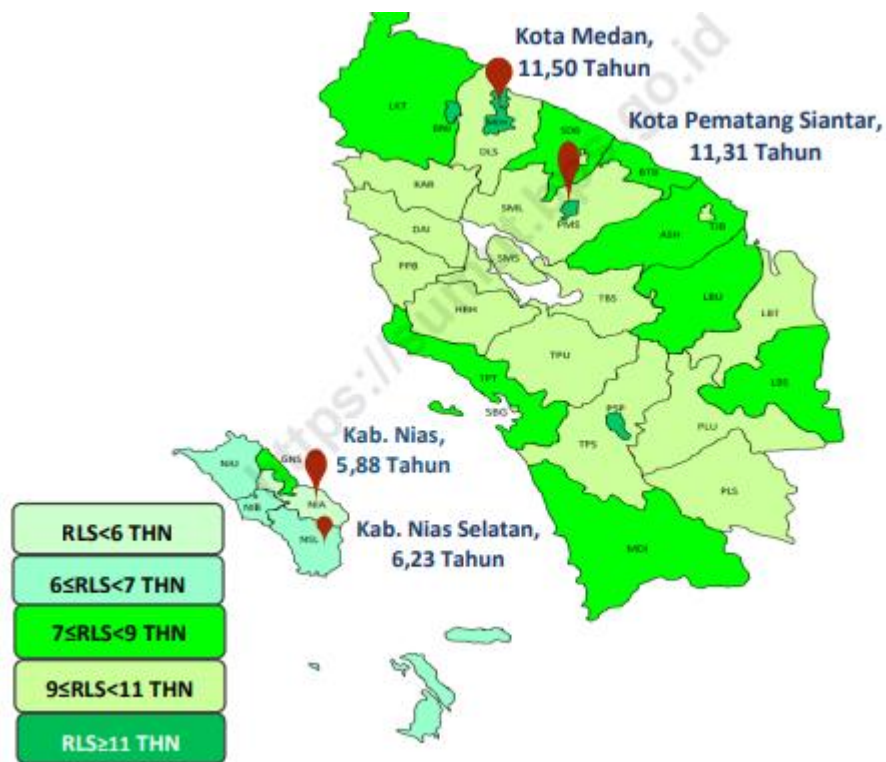
UHH tertinggi dicapai Kota Pematang Siantar dengan capaian sebesar 74,25 tahun. Di sisi lain, Kabupaten Mandailing Natal masih berada di posisi terendah dengan umur harapan hidup saat lahir sebesar 63,05 tahun dengan pertumbuhan di tahun 2020- 2021 sebesar 0,64 persen. Terdapat kecenderungan bahwa relatif lebih mudah meningkatkan capaian pada daerah yang masih rendah melalui beberapa program pembangunan, dibandingkan daerah dengan capaian yang sudah tinggi.



Gambar 4. 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022

Pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka. Kondisi pendidikan pada level kabupaten/kota tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan capaian baik angka harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. Pertumbuhan di level kabupaten/kota untuk angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pun tidak jauh berbeda kondisinya dengan level provinsi. Angka harapan lama sekolah tertinggi dicapai Kota Medan dengan capaian sebesar 14,77 tahun, diikuti Kota Pematang Siantar dengan harapan lama sekolah 14,59 tahun. Kabupaten Nias Selatan memiliki angka harapan lama sekolah terendah sebesar 12,48 tahun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,71 persen. Hal ini menunjukkan anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2022 diharapkan bisa menyelesaikan sekolah sampai dengan tamat SMA sederajat.

Indikator kedua dari dimensi pengetahuan yaitu rata-rata lama sekolah. Ratarata lama sekolah tertinggi ditempati Kota Medan dengan capaian sebesar 11,50 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan, sentra perekonomian, dan pusat kegiatan lainnya di Sumatera Utara sehingga menjadi kantung penduduk dengan pendidikan tinggi. Inilah yang menyebabkan rata-rata lama sekolah di Kota Medan menjadi yang tertinggi.



Gambar 4. 6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022.

Capaian rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Nias yaitu hanya 5,88 tahun atau sekitar kelas 5 SD. Meskipun demikian pertumbuhan rata-rata lama sekolah tahun 2020-2021 di Nias merupakan yang paling besar yaitu sebesar 4,26 persen atau naik sebesar 0,24 poin. Dimensi standar hidup layak

diukur dengan pengeluaran per kapita. Di Sumatera Utara yang mencapai pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Medan sebesar 15,50 juta rupiah per tahun. Kota Medan merupakan kota yang menjadi sentra perekonomian di Sumatera Utara, bahkan di Pulau Sumatera. Kabupaten Nias Barat menempati posisi terendah dengan pengeluaran per kapita sebesar 5,92 juta rupiah per tahun. Secara umum pengeluaran per kapita per tahun kabupaten/kota yang berada di Kepulauan Nias masih tergolong rendah.



Gambar 4. 7 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2022

7. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Tabel 4. 3 Proyeksi dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2020-2035

Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)
Nias	147 308	157 547	165 958	172 841
Mandailing Natal	470 814	513 541	551 993	587 001
Tapanuli Selatan	300 148	320 343	338 067	353 456
Tapanuli Tengah	362 794	402 936	442 171	479 077
Tapanuli Utara	311 392	330 878	349 924	368 101
Toba	205 103	219 579	233 750	247 733
Labuhan Batu	492 556	527 056	556 401	580 629
Asahan	767 654	824 563	874 651	917 647
Simalungun	986 903	1 067 540	1 141 435	1 206 997
Dairi	307 344	336 428	365 119	392 273
Karo	403 478	432 072	458 476	481 989
Deli Serdang	1 923 526	2 078 070	2 214 325	2 332 422
Langkat	1 027 232	1 089 927	1 136 239	1 167 694
Nias Selatan	359 618	397 246	430 851	458 001
Humbang Hasundutan	197 607	209 473	221 835	234 761
Pakpak Bharat	51 972	57 228	62 202	66 863
Samosir	136 003	144 811	153 434	161 894
Serdang Bedagai	655 348	700 071	738 687	772 111
Batu Bara	409 034	443 902	473 843	498 923
Padang Lawas Utara	259 592	285 692	310 332	334 204
Padang Lawas	259 803	285 718	307 951	326 467
Labuhanbatu Selatan	312 779	342 234	368 802	392 810
Labuhanbatu Utara	380 502	415 493	446 924	474 638
Nias Utara	147 289	161 458	174 527	185 723
Nias Barat	89 408	99 133	107 969	115 821
Kota Sibolga	89 761	92 232	95 129	98 787
Kota Tanjung Balai	175 526	188 047	199 284	208 872
Kota Pematangsiantar	267 852	279 185	288 508	295 312
Kota Tebing Tinggi	172 339	182 963	191 682	198 521
Kota Medan	2 435 339	2 498 222	2 556 103	2 611 916
Kota Binjai	290 878	310 910	327 529	340 892
Kota Padang Sidempuan	224 376	243 827	261 307	275 976
Kota Gunungsitoli	135 505	147 514	158 187	167 722
Provinsi Sumatera Utara	14 756 783	15 785 839	16 703 595	17 508 074

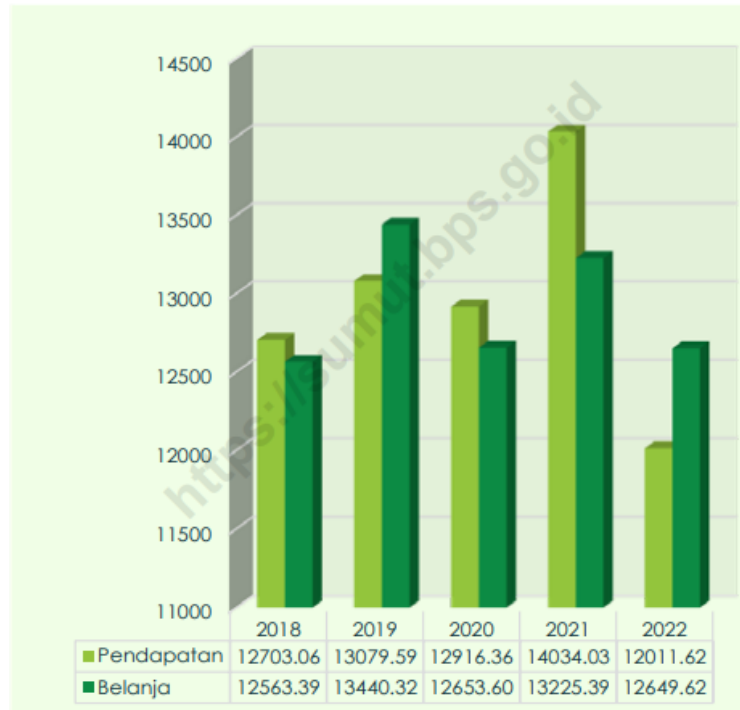
Sumber : Bps.go.id

Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada 2020 didominasi oleh Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat dengan distribusi masing-masing sebesar 16,50 persen, 13,03 persen, dan 6,96 persen. Kabupaten Nias Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit pada 2020 yaitu sebesar 89.408 jiwa dengan distribusi sebesar 0,61 persen.

8. Pengeluaran dan Realisasi Pemerintah Terhadap Sektor di Sumatera Utara.

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari bidang pendidikan. Belanja daerah bidang pendidikan

ini harus sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural. APBD sendiri di dapat dari anggaran pemerintah yang telah tertuang kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi pada bidang kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari bidang kesehatan yang mana anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2016 kurang dari 10%. Adapun total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi DSumatera Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 4. 8 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (milyar rupiah), 2018-2022

Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 12,76 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,82 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 5,09 triliun, dan sisanya dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Realisasi Belanja Pemerintah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 12,76 triliun, yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp 12,65 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 112 miliar.

9. Perkembangan Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Menurut kabupaten.kota di provinsi sumatera utara

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari bidang pendidikan. Belanja daerah bidang pendidikan ini harus sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 49 minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural. APBD sendiri di dapat dari anggaran pemerintah yang telah tertuang kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi pada bidang kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari bidang kesehatan yang mana anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2016 kurang dari 10%.

Tabel 4. 4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sampai 2022 (dalam Milyar)

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan
Kab Asahan	23.31	1.90	34.02	1.27	16.044	1.029	18.046	0.072
Kab Dairi	19.42	0.02	16.50	0.02	17.065	0.02	1.309	2.099
Kab Deli Serdang	32.32	7.79	54.13	7.56	7.019	39.062	34.074	10.056
Kab Karo	20.69	0.52	23.38	0.59	19.064	0.60	17.02	0.035
Kab Labuhan Batu	15.50	2.53	15.43	2.60	15.061	2.064	18.047	6.013
Kab Langkat	30.54	4.02	6.88	41.60	33.007	402	3.621	3.038
Kab Mandailing Natal	29.79	3.80	270	3.05	30.033	3.011	2.406	2.040
Kab Nias	13.23	1.66	10.51	1.39	1.403	1.041	2.112	0.055
Kab Simalungun	37.20	1.34	48.30	0.76	43.088	0.078	41.046	0.026
Kab Tapanuli Selatan	16.17	0.52	16.13	0.51	16.088	0.052	16.056	0.048
Kab Tapanuli Tengah	23.20	0.55	23.90	0.67	25.094	0.068	1.744	0.027
Kab Tapanuli Utara	20.49	0.73	24.80	0.93	20.023	0.095	19.047	0.024
Kab Toba Samosir	20.3	0.18	21.54	0.13	18.054	0.013	13.033	0.013
Kab Binjai	6.22	1.26	8.005	1.27	70.290	1.029	6.084	1.016
Kota Medan	26.78	11.53	42.61	7.084	33.057	7.098	16.021	7.016
Kab Pematang	13.74	1.09	21.36	1	1.407	1.02	7.096	0.082

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan
Siantra								
Kota Sibolga	4.97	0.56	5	0.028	5.017	0.028	15.032	0.030
Kota Tanjung Balai	6.72	0.91	604	0.098	6.079	0.099	5.017	0.057
Kota Tebing Tinggi	7.53	1,23	9.035	0.055	7.062	0.056	5.044	0.030
Kota Padang Sidempuan	8.22	1.29	11.023	1.041	9.046	1.043	7.026	0.057
Kab Pakpak Barat	7.79	0.22	7.077	0.053	6.043	0.054	4.046	0.019
Kab Nias Selatan	43.35	0.43	38.055	0.027	50.066	0.027	47.025	0.057
Kab Humbang Hasundutan	13.41	0.05	12.022	0.010	15.034	0.010	10.057	0.002
Kab Serdang Bedagai	21.08	2.69	25.067	2.045	21.091	2.049	18.012	3.052
Kab Samosir	13.07	0.55	12.082	0.033	12.009	0.033	9.020	0.004
Kab Batu Bara	13.75	1.13	18.061	0.083	15.075	0.084	15.073	0.043
Kab Padang Lawas	16.55	3.05	14.088	2.068	20.066	2.073	13.052	1.025
Kab Padang Lawas Utara	17.20	0.66	15.096	0.056	17.075	0.057	19.063	0.054
Kab Labuhanbatu Selatan	18.21	0.72	13.088	0.066	16.071	0.067	7.002	0.066
Kab Labuhanbatu Utara	19.20	0.42	23.042	0.045	19.037	0.046	16.018	0.029
Kab	14.80	0.67	11.051	0.045	14.086	0.045	11.006	0.027

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Sektor Pendidikan
Nias Utara								
Kab Nias Barat	10.54	0.02	9.067	0.017	12.016	0.017	12.033	0.008
Kab Gunung Sitoli	5.94	1.73	7.068	1.013	7.062	1.014	4.068	0.078
TOTAL	591,23	55,77	226168,5	13252	617.732	60.915	417.336	35.355



Gambar 4.9 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Tahun 2019 sampai 2022

Dari hasil grafik dan tabel pengeluaran pemerintah untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan diatas dapat disimpulkan bahwa, terjadi peningkatan yg signifikan untuk pengeluaran pemerintah saktor Kesehatan pada tahun 2019 menuju 2020 ini terjadi dikarenakan pandemic covid-19 yang menyerang hampir seluruh dunia, sehingga anggaran pemerintah dialokasi untuk menangani pandemic covid-19, seperti pemenuhan alat Kesehatan, alat pelindung diri, biaya

perawatan Kesehatan Masyarakat yang di gratiskan pemerintah, vitamin daya tahan tubuh, hingga biaya untuk gaji para tenaga Kesehatan di Indonesia. Ini mulai membaik atau menurun pada tahun 2022 yang dimana Kesehatan di dunia pun mulai membaik. Untuk anggaran pemerintah bidang Pendidikan juga terbilang cukup stabil selama 4 tahun terakhir. Yang artinya Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandemic covid-19 yang menyerang hampir di seluruh dunia.

4.2.2 Hasil Analisis Regresi

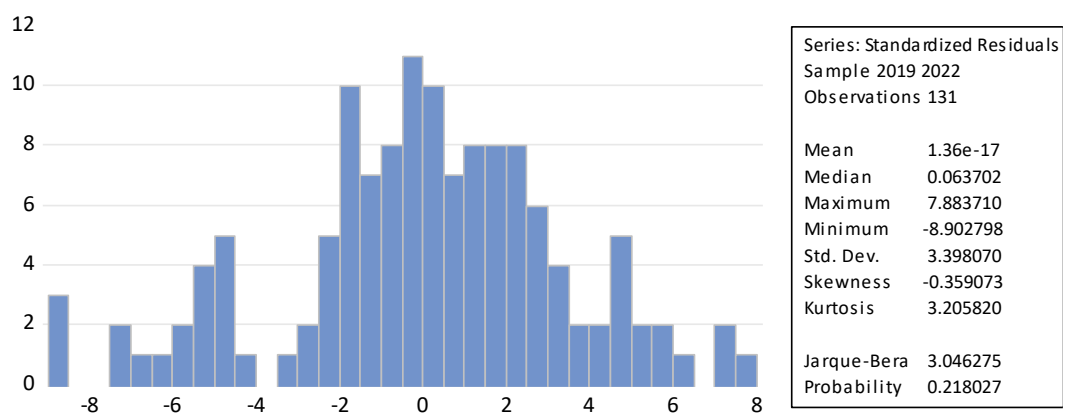
a. UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

Menurut kriteria pengambilan keputusan maka ;

Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal

Jika nilai sig < 0,05 , maka data tidak berdistribusi normal



Gambar 4. 11 Hasil Olah Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada data diatas terlihat bahwa nilai probability nya sebesar $0,218027 > 0,05$ atau $21,80 \% > 5\%$, maka data diatas dapat dikatakan normal.

2. UJI MULTIKOLNEARITAS

Variance Inflation Factors
 Date: 08/25/23 Time: 21:15
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.316160	6.474360	NA
GP	0.005015	2.776891	1.080585
GS	0.114760	1.464819	1.193744
KM	0.000581	2.990546	1.314545
TPT	0.100318	5.647252	1.410101

Gambar 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Dapat dilihat koefisien korelasi masing-masing variabel bebas yaitu Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Kesehatan (GS) memiliki nilai centered VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) maka tidak terjadi multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas.

3. UJI HETEROKEDASTISITAS

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: IPM C GP GS
 Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	65.3258...	33	0.000673045149778...

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-383.051...	128
Unrestricted LogL	-350.388...	128

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/29/23 Time: 02:32
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 33
 Total panel (unbalanced) observations: 131
 Iterate weights to convergence
 Convergence achieved after 10 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.7304...	0.229601...	308.0580...	1.33898...
GP	0.01183...	0.004358...	2.714413...	0.00755...
GS	0.00199...	0.002961...	0.672275...	0.50261...

Weighted Statistics

R-squared	0.05786...	Mean dependent variable	10.0076867149849
Adjusted R-squared	0.04314...	S.D. dependent variable	1.25351248587042
S.E. of regression	4.56571...	Akaike info criterion	5.09524304622023
Sum squared resid	2668.25...	Schwarz criterion	5.161087259728653
Log likelihood	-350.388...	Hannan-Quinn	5.421998492640905
F-statistic	3.93102...	Durbin-Watson	1.26749281108977
Prob(F-statistic)	0.02203...		

Unweighted Statistics

R-squared	0.00294...	Mean dependent variable	10.0641221374046
Sum squared resid	2668.29...	Durbin-Watson	1.267535290198784

Gambar 4. 13 UJI HETEROKEDASTISITAS

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probability variable GP sebesar $0,00755 < 0,05$, variable GS sebesar $0,50261 > 0,05$, hal ini menunjukkan terjadi heteroskedastisitas untuk variable pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, namun tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan artinya bahwa syarat asumsi klasik untuk model regresi linier berganda antara pertumbuhan ekonomi (PE), rata-rata lama sekolah (RLS), produk domestik regional bruto perkapita (PDRBKAP), investasi (I) tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Model Estimasi

Model ekonometrika pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$IPMrt = \beta_0 + \beta_1 GK_1 + \beta_2 GPrt + \beta_3 KM + \beta_4 TPT + \epsilon_t$$

Selanjutnya model tersebut akan di estimasi untuk memperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan tersebut. Dibawah ini merupakan hasil analisis regresi. Regresi dilakukan dengan variabel independennya yaitu, Indeks Pembangunan Manusia, Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12* berikut ini adalah hasil running data yang telah diolah :

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/23 Time: 15:44
Sample: 2019 2022
Periods included: 4
Cross-sections included: 33
Total panel (unbalanced) observations: 131

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.96520	0.387762	183.0121	0.0000
GP	0.010085	0.011292	0.893142	0.3740
GS	0.002212	0.007088	0.312063	0.7557

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.439087	Mean dependent var	71.06641
Adjusted R-squared	0.240430	S.D. dependent var	4.537166
S.E. of regression	3.954289	Akaike info criterion	5.810981
Sum squared resid	1501.095	Schwarz criterion	6.579163
Log likelihood	-345.6192	Hannan-Quinn criter.	6.123128
F-statistic	2.210282	Durbin-Watson stat	2.071487
Prob(F-statistic)	0.001368		

Gambar 4. 14 HASIL REGRESI LINEAR ERGANDA

Dari hasil regresi diatas yaitu terdapat variabel, Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan (GP), Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan (GS), yang memiliki probabilitasnya kurang dari ($\text{sig } \alpha > 5\%$) yang berarti semua variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel . Pada hasil regresi data panel diatas memiliki nilai *Adjusted R-Squared* 0.240430

B. Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.312671	(32,96)	0.0009
Cross-section Chi-square	74.864196	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/23 Time: 15:45
Sample: 2019 2022
Periods included: 4
Cross-sections included: 33
Total panel (unbalanced) observations: 131

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.02839	0.434793	163.3614	0.0000
GP	0.010468	0.011306	0.925916	0.3562
GS	-0.000530	0.007023	-0.075460	0.9400

R-squared	0.006685	Mean dependent var	71.06641
Adjusted R-squared	-0.008836	S.D. dependent var	4.537166
S.E. of regression	4.557166	Akaike info criterion	5.893913
Sum squared resid	2658.274	Schwarz criterion	5.959758
Log likelihood	-383.0513	Hannan-Quinn criter.	5.920669
F-statistic	0.430708	Durbin-Watson stat	1.170190
Prob(F-statistic)	0.650987		

Gambar 4. 15 Uji Chow Data Panel

Dari hasil uji chow, nilai prob pada *cross-section* F sebesar 0.0009 (<0,05) maka model yang terpilih yaitu *fixed effect* (FEM), maka akan dilanjutkan ke uji hausman.

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.270399	2	0.8735

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GP	0.010085	0.010279	0.000015	0.9599
GS	0.002212	0.000910	0.000006	0.6042

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/23 Time: 15:50
Sample: 2019 2022
Periods included: 4
Cross-sections included: 33
Total panel (unbalanced) observations: 131

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.96520	0.387762	183.0121	0.0000
GP	0.010085	0.011292	0.893142	0.3740
GS	0.002212	0.007088	0.312063	0.7557

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.439087	Mean dependent var	71.06641
Adjusted R-squared	0.240430	S.D. dependent var	4.537166
S.E. of regression	3.954289	Akaike info criterion	5.810981
Sum squared resid	1501.095	Schwarz criterion	6.579163
Log likelihood	-345.6192	Hannan-Quinn criter.	6.123128
F-statistic	2.210282	Durbin-Watson stat	2.071487
Prob(F-statistic)	0.001368		

Gambar 4. 16 Uji Hasuman Data Panel

Bisa dilihat nilai prob pada *Cross Section random* sebesar $0.8735 > (,0,05)$ maka sudah bisa dipastikan bahwa model yang terpilih yaitu *random model effect* (REM), maka perlu dilanjut ke uji *Lagrange Multiplier* (LM test).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM test)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	11.85333 (0.0006)	2.008708 (0.1564)	13.86203 (0.0002)
Honda	3.442866 (0.0003)	-1.417289 (0.9218)	1.432299 (0.0760)
King-Wu	3.442866 (0.0003)	-1.417289 (0.9218)	-0.347219 (0.6358)
Standardized Honda	3.596832 (0.0002)	-1.227249 (0.8901)	-2.893697 (0.9981)
Standardized King-Wu	3.596832 (0.0002)	-1.227249 (0.8901)	-3.179159 (0.9993)
Gourieroux, et al.	--	--	11.85333 (0.0010)

Gambar 4. 17 Uji Hausman Data Panel

Bisa dilihat nilai prob pada *Cross Section random* sebesar $0.0006 < (,0,05)$ maka sudah bisa dipastikan bahwa model yang terpilih yaitu *random model effect* (REM).

Dapat disimpulkan dari pengujian yang sudah dilakukan, *model random effect* (REM) yang terbaik, maka dari itu untuk melakukan regresi bisa digunakan *model random effect* (REM).

b. Tahapan Analisis

- **Penaksiran**

1. **Korelasi**

Dari hasil regresi yaitu variabel tingkat indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara (IPM) yang sudah di logaritma, diperoleh nilai R sebesar 0.240430, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran pemerinath sektor kesehatan (GS) adalah sebesar 0.240430.

- **Pengujian**

1. **Uji Parsial (Uji t-statistik)**

Untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing- masing variable bebas Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran pemerinath sektor kesehatan (GS) indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara (IPM) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (GP)**

- 1) **Hipotesis**

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak ada hubungannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan ada hubungannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara).

- 2) **Uji Statistik**

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

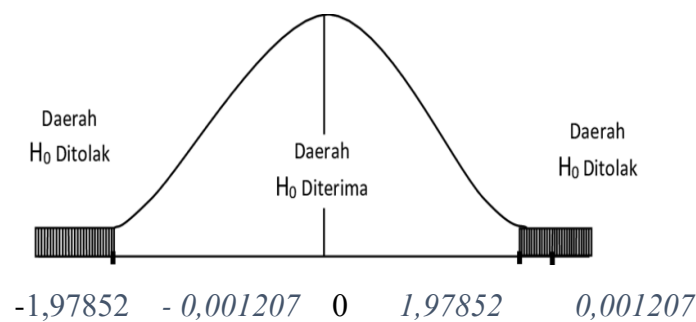
$$t_h = 0.010085 / 0,011292 = - 0,001207$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T \text{ table} &= \pm t (\alpha/2, n-k-1) \\ &= \pm t (10\% / 2, 132 - 2 - 1) \\ &= \pm t (5\%, 129) \\ &= \pm 1,97852 \end{aligned}$$

3) Kriteria Uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* - 0,001207 dengan nilai t-tabel 1,97852. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 diterima dan artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



Gambar 4. 18 Kurva Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

4.) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Persentase belanja pemerintah pusat bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan investasi di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat. Hasil ini juga terlihat pada saat penulis melakukan Literatur Review terhadap penelitian sebelumnya bahwa Variabel Pengeluaran

pemerintah sektor Pendidikan memiliki pengaruh, namun untuk Provinsi Sumatera Utara variabel ini tidak memiliki pengaruh. Dari hasil literatur review yang penulis lakukan PDRB memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (GS)

1.) Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak ada hubungannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan ada hubungannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara)

2.) Uji Statistik (t)

$$t_h = \beta_1 / S_{\beta_1}$$

$$t_h = 0.002212 / 0,007088 = - 0,004876$$

Dibandingkan dengan t.tabel sebagai berikut:

$$T \text{ table} = \pm t (\alpha/2, n-k-1)$$

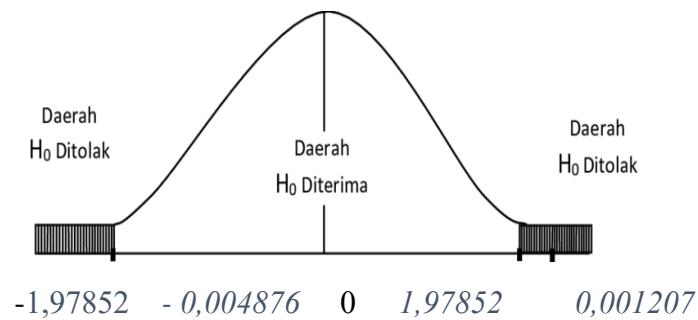
$$= \pm t (10\% / 2, 132 - 2 - 1)$$

$$= \pm t (5\%, 129)$$

$$= \pm 1,97852$$

3.) Kriteria Uji

Pada variabel ini menggunakan menggunakan nilai α 5% memiliki nilai *t-statistic* - 0,004876 dengan nilai t-tabel 1,97852. hal ini membuktikan bahwa hipotesis H_0 diterima dan artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara dapat dilihat juga pada tabel distribusi berikut:



Gambar 4. 19 Kurva Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

4.) Kesimpulan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Persentase belanja pemerintah pusat bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan masih jauh dibawah setiap tahunnya, selama periode berjalan anggaran yang di realisasikan hanya mengikuti tahun berjalan dan tidak dapat terserap dengan baik, banyaknya faktor yang harus ditekankan oleh pemerintah daerah terutama bagaimana cara mengatur keuangan di bidang kesehatan agar tidak tersendat agar realisasi yang dikeluarkan sebanding dan sesuai dengan pengeluaran pemerintah lainnya.. Hasil ini juga terlihat pada saat penulis melakukan Literatur Review terhadap penelitian sebelumnya bahwa Variabel Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan di daera Yogyakarta memiliki pengaruh, namun untuk Provinsi Sumatera Utara varuabel ini tidak memiliki pengaruh. Dari hasil literatur review yang penulis lakukan PDRB memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

1. Uji statistic,digunakan Uji F

a) Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Tidak Pengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara).

$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$ (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Memiliki Pengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara).

b) Uji Statistik, digunakan Uji F

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

$$F = \frac{0,439087^2 / 2-1}{(1- 0,439087^2)/ (132-1)}$$

$$F = 0,193081$$

Dibandingkan dengan F.tabel sebagai berikut ;

$$F. \text{ table} = (\alpha/2, n-1)$$

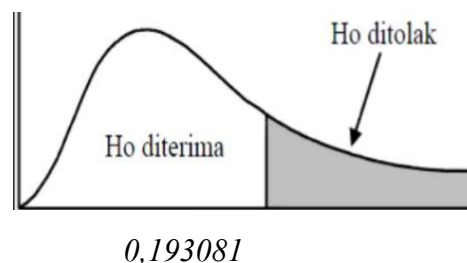
$$F (10\% / 2, 132-1)$$

$$F (5\%, 131)$$

$$= 3.07$$

1) Kriteria Uji

Dapat dilihat juga melalui distribusi kurva f dengan nilai f tabel sebesar 3.07 sebagai berikut:



Gambar 4. 20 Kurva Distribusi Uji F Pada Model Regresi

2) Kesimpulan

Dengan demikian maka H_0 diterima yang artinya bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi persentase variable total dalam menjelaskan variable terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variable bebas (independent) secara Bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi yaitu variable yang mempengaruhi tingkat indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara (IPM) dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.240430 artinya secara Bersama-sama, Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (GS) kontribusinya terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 24,04%. Sedangkan 75,96% dijelaskan oleh variable lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

3. Korelasi

Dari hasil regresi yaitu variabel tingkat indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara (IPM) yang sudah di logaritma, diperoleh nilai R sebesar 0.240430, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (GS) adalah sebesar 0.240430.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022). Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji analisis data panel dengan menggunakan model Fixed Effect, hasil dari penelitian ini menunjukkan Berdasarkan dari model estimasi yaitu variable yang mempengaruhi tingkat indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara (IPM) dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.240430 artinya secara Bersama- sama, Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (GP) dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (GS) kontribusinya terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 24,04%. Sedangkan 75,96% dijelaskan oleh variable lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Persentase belanja pemerintah pusat bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan investasi di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat. Hasil ini juga terlihat

pada saat penulis melakukan Literatur Review terhadap penelitian sebelumnya bahwa Variabel Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan memiliki pengaruh, namun untuk Provinsi Sumatera Utara variabel ini tidak memiliki pengaruh. Dari hasil literatur review yang penulis lakukan PDRB memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

3. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Belanja Daerah Bidang Kesehatan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Persentase belanja pemerintah pusat bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan masih jauh dibawah setiap tahunnya, selama periode berjalan anggaran yang di realisasikan hanya mengikuti tahun berjalan dan tidak dapat terserap dengan baik, banyaknya faktor yang harus ditekankan oleh pemerintah daerah terutama bagaimana cara mengatur keuangan di bidang kesehatan agar tidak tersedat agar realisasi yang dikeluarkan sebanding dan sesuai dengan pengeluaran pemerintah lainnya.. Hasil ini juga terlihat pada saat penulis melakukan Literatur Review terhadap penelitian sebelumnya bahwa Variabel Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan di daera Yogyakarta memiliki pengaruh, namun untuk Provinsi Sumatera Utara variabel ini tidak memiliki pengaruh. Dari hasil literatur review yang penulis lakukan PDRB memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah:

- a. Bagi Dinas Pendidikan, penyusunan anggaran berbasis kinerja dan tingkat efektivitas belanja yang dilakukan di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan baik oleh karena itu perlu di pertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai tingkat efesiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Tujuan dan sasaran organisasi yang belum tercapai pada tahun sebelumnya diharapkan dapat segera terwujud di tahun mendatang dengan adanya jalinan kerja sama antara pimpinan dan bawahan.
- b. Bagi Dinas Kesehatan, dalam melakukan perencanaan dan anggaran harus peka terhadap masalah yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dihasilkan sehingga anggaran yang disusun mendapat makna tidak strategis bagi masyarakat. Kemudian, laporan penggunaan anggaran rutin yang disusun dalam pencatatan transaksi ke dalam jurnal harus lebih teliti untuk mengurangi risiko kesalahan dan diharapkan agar seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan disiplin kerja dan disiplin waktu dalam

melaksanakan anggaran yang telah direncanakan agar anggaran dapat terealisasi dengan baik

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya,

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitian. Dikarenakan, penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 4 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Andar Ristabet Hesda. (2017). *Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Sumatera Utara September 2022*. 05, 1–12. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/995/persentase-penduduk-miskin-september-2022-turun-0-09-poin-menjadi-8-33-persen.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2014. *07310.1517*, 107.
- BI. (2022). Laporan Perekonomian Global. *Bank Indonesia*, 1–33. www.bi.go.id
- bps.go.id. (n.d.-a). *Indeks Pembangunan Manusia*. Bps.Go.Id. Retrieved May 9, 2023, from <https://sumut.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- bps.go.id. (n.d.-b). *Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi (ribu rupiah) Menurut kabupaten/Kota 2020-2022*. Bps.Go.Id.
- bps.go.id. (2022a). *Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 2020-2022*. Bps.Go.Id. <https://sumut.bps.go.id/indicator/26/59/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>
- bps.go.id. (2022b). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2022*. Bps.Go.Id. <https://sumut.bps.go.id/publication/2022/12/30/6f236c9840a31a78fbe16b1d/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-sumatera-utara-2022.html>
- djpb.kemenkeu.go.id. (n.d.). *Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. Retrieved September 5, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumut/id/profil/sejarah.html#:~:text=Secara geografis Provinsi Sumatera Utara,Pegunungan Bukit Barisan>
- Domestik, P., & Bruto, R. (2022). *Bidang Kesehatan , Bidang Pendidikan Dan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam Bidang Kesehatan , Bidang Pendidikan Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Indeks Peman.*
- Dzulhijjy, M. I. (2021). ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEMISKINAN DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Universitas Brawijaya, July*, 1–13.

Hasan Ashari, W. M. P. A. dan P. (2014). *Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan?* Bppk.Kemenkeu.Go.Id. <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/anggaran-pendidikan-20-apakah-sudah-dialokasikan-761329>

id.wikipedia.org. (n.d.). *Sumatera Utara*. Id.Wikipedia.Org. Retrieved September 5, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara

jdih.kemenkeu.go.id. (n.d.). *PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989*. Jdih.Kemenkeu.Go.Id. Retrieved September 5, 2023, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1989/2tahun~1989uupenj.htm>

Jehuda Jean Sanny Mongan. (2019). *Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia*. Itrev.Kemenkeu.Go.Id. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/122>

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). BUKU EKONOMI PUBLIK. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Statistik, B. P. (2015). *Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sumutprov*, 3.